



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rj)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rj>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sirkulasi Elite Lokal di Kabupaten Ponorogo

Rizki Melina Pangestika¹, Ali Maksum², Muhtar Haboddin³

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, rizkimelinap@gmail.com

²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, alimaksum@ub.ac.id

³Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, muhtar_haboddin@ub.ac.id

Corresponding Author: rizkimelinap@gmail.com¹

Abstract: *This study departs from the failure of the incumbent which led to the elite circulation process in the 2020 Regional Head Election in Ponorogo Regency, East Java. This research aims to reveal the circulation process, factors that cause elite circulation and the challenges of circulation. To that end, this research applies a qualitative methodology with a case study method. This study found that elite circulation occurs from the non-governing elite to the governing elite. The factors causing elite circulation are as follows: first, it was driven because the large coalition built by the incumbent Ipong Muchlissoni did not go well and even most of it switched to the opposing party. Second, elite circulation occurs because there are several controversies over the incumbent's behavior in the view of people who are still strong in santri and cultural elements. Third, the incumbent's performance is considered poor, one of which is related to allegations of corruption and various policies that are not pro-people. Fourth, the challenger's strategy adjusted the culture of the Ponorogo community who wanted a populist leader and the challenger's success in embracing mass organizations in Ponorogo, so that the elite circulation process could occur. This study also provides a political understanding that Pilkada is a process to seize and maintain power, where the incumbent tries to maintain his position while the challenger tries to seize it in the Pilkada arena. This study found academic implications that elite circulation is not only driven by economic and political power, but also by strong social relations with the community. The findings reinforce Pareto's elite circulation theory, emphasizing that in certain contexts, social capital can be more influential than economic capital in elite turnover. In addition, elite circulation can take place effectively through regional elections if the new elite is able to take advantage of social dynamics.*

Keyword: *Elite, Elite Circulation, Incumbent, Regional Election*

Abstrak: Studi ini berangkat dari kegagalan petahana yang menyebabkan proses sirkulasi elite pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses sirkulasi, faktor penyebab sirkulasi elite dan dampak dari adanya sirkulasi. Untuk itu, penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus. Studi ini menemukan hasil bahwa dalam konteks Kabupaten Ponorogo proses sirkulasi elite terjadi antara *governing elite* melawan *non-governing elite*. Adapun faktor penyebab sirkulasi elite sebagai berikut: pertama di picu karena koalisi besar yang dibangun

oleh petahana Ipong Muchlissoni tidak berjalan dengan baik. Kedua karena terdapat beberapa kontroversi petahana dalam pandangan masyarakat yang masih kuat dengan unsur santri dan budaya. Ketiga mengenai kinerja petahana yang dinilai buruk. Keempat strategi yang tepat diracik oleh kubu penantang lewat penyesuaian kultur masyarakat Ponorogo serta keberhasilan penantang dalam merangkul ormas ormas di Ponorogo. Studi ini juga memberikan pemahaman politik bahwa Pilkada sebagai proses untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, dimana petahana berusaha mempertahankan jabatannya sementara penantang berusaha merebutnya di arena Pilkada. Penelitian ini menemukan implikasi akademis bahwa sirkulasi elite tidak hanya didorong oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Temuan ini memperkuat teori sirkulasi elite Pareto, dengan menekankan bahwa dalam konteks tertentu, modal sosial bisa lebih berpengaruh daripada modal ekonomi dalam pergantian elite. Selain itu, sirkulasi elite dapat berlangsung efektif melalui Pilkada jika elite baru mampu memanfaatkan dinamika sosial.

Kata Kunci: Elite, Sirkulasi Elite, Pilkada, Petahana

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan terjadinya proses sirkulasi atau pergantian elite politik. Sirkulasi elite mengacu pada peralihan kekuasaan dari satu kelompok elite kepada kelompok lainnya, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam politik lokal, salah satu bentuk nyata dari sirkulasi elite adalah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi antara kandidat, tetapi juga ruang bagi elite politik untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Pergantian kekuasaan ini bisa terjadi melalui dua model. Pertama, sirkulasi elite antara elite yang sedang berkuasa dengan non-elite atau massa, dan kedua sirkulasi yang terjadi antar elite yang sudah mapan di lingkaran politik. Menurut Bottomore sirkulasi elite merujuk pada individu individu yang berputar antara elite dan massa atau non elite, atau bisa juga dikatakan sebagai pergantian dari elite yang memerintah digantikan dengan elite yang lain (Bottomore, 2006). Kedua model ini memberikan dinamika tersendiri dalam kompetisi politik di tingkat lokal.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020, fenomena sirkulasi elite dapat dilihat dari kekalahan petahana Ipong Muchlissoni, yang telah menjabat sebagai Bupati selama lima tahun, ditumbangkan oleh kompetitornya Sugiri Sancoko, seorang politisi yang juga pernah mencalonkan diri dalam Pilkada Ponorogo tahun 2015. Kekalahan Ipong merupakan contoh penting dari bagaimana elite yang sudah mapan dapat terdepak dari kekuasaan ketika gagal beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial di masyarakat.

Fenomena sirkulasi elite ini menjadi semakin menarik ketika melihat konfigurasi politik di Kabupaten Ponorogo menjelang Pilkada 2020. Ipong Muchlissoni diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari enam partai politik, yaitu Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PKS, dengan total 36 kursi di DPRD. Dukungan koalisi besar ini memberi Ipong kepercayaan diri yang tinggi untuk mempertahankan jabatannya sebagai Bupati Ponorogo. Pada Pemilihan Legislatif 2019, partai-partai pendukung Ipong berhasil meraih posisi dominan di DPRD, dengan Nasdem sebagai partai asal Ipong meraih 10 kursi, PKB 8 kursi, Gerindra 5 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 4 kursi, dan PKS 4 kursi. Sebaliknya, Sugiri Sancoko, yang didukung oleh koalisi kecil terdiri dari PDIP, PAN, Hanura, dan PPP, hanya berhasil mengumpulkan 9 kursi di DPRD. Dengan dukungan yang lebih kecil di parlemen, Sugiri dianggap sebagai *underdog* dalam Pilkada ini.

Ipong Muchlissoni dan lawannya Sugiri Sancoko merupakan kompetitor lama yang sebelumnya sempat bertemu di Pilkada Ponorogo tahun 2015, kemudian bertemu kembali ditahun 2020. Perbedaannya di tahun 2015 Ipong berhasil menang kemudian di tahun 2020

berbalik Sugiri yang berhasil menggeser posisi petahana dengan perolehan suara yang sangat jauh perbedaannya. Jika dilihat dari prosentase perolehan suara terjadi pergeseran suara yang sangat signifikan dari masyarakat Ponorogo. Hasil perolehan suara ditahun 2015 Ipong menang dengan total 219.949 (39,37 %) kemudian di tahun 2020 harus kalah telak dengan seilish jauh dibawah Sugiri Sancoko. Ipong mendapatkan 218.073 (38,3%) sedangkan Sugiri mendapat 352.047(61,7%).

Sejauh ini beberapa riset lebih banyak melihat dari segi kemenangan petahana yang berhasil mempertahankan kekuasaannya yang memang sudah diunggulkan dari modal yang dibangun pada saat masih menjabat sebagai Kepala Daerah. Seperti dinasti dan juga faktor etnis adalah faktor utama yang mempengaruhi kemenangan kandidat petahana (Ardiyanto, 2023). Kemudian kemenangan petahana juga dipengaruhi oleh prestasi kerja, modal kerja (*personal capital*), kendaraan politik dan tiga modal politik yakni, modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial (Indah, 2023). Dari beberapa kecenderungan penelitian, kajian ini hendak memperluas. Mengisi celah kekosongan bahwa, tidak ada jaminan petahana selalu menang dalam sebuah kontestasi. Pada konteks tertentu, kegagalan petahana dapat disebabkan karena keberhasilan kompetitor dalam memanfaatkan modal sosial sehingga dapat mengalahkan modal politik dan modal ekonomi yang dimiliki oleh petahana. Model ini terjadi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020, ketika petahana gagal mempertahankan posisinya, sehingga memungkinkan terjadinya proses sirkulasi elite.

Sirkulasi elite politik lokal dalam penelitian ini berfokus pada kekalahan petahana Ipong Muchissoni yang dinilai memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini terdapat pada medan kompetisi yang memperebutkan kekuasaan dalam hal ini adalah petahana yang sebelumnya sudah mempunyai keunggulan keunggulan dan modal mapan tetapi harus kalah dalam kontestasi Pilkada merupakan fenomena yang sangat khusus. Hal ini membuktikan bahwa elite yang berkuasa atau petahana tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan politik sehingga pada akhirnya tidak mampu untuk mempertahankan kekuasaannya (Haboddin, 2020).

Maka dari itu melihat uraian diatas peneliti menemukan kekosongan penelitian yang belum pernah di lakukan oleh penelitian sebelumnya terlebih dalam melihat sirkulasi elite pada konteks kekalahan petahana yang gagal dalam mempertahankan kekuasaannya kemudian digantikan dengan elite baru yang memimpin. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran mengenai pentingnya menghadirkan kembali konsep sirkulasi elite pada konteks Pilkada langsung. Dengan demikian tulisan ini berfokus untuk melihat bagaimana proses terbentuknya sirkulasi elite, faktor terbentuknya sirkulasi elite dan juga dampak yang dihadapi setelah terjadinya sirkulasi elite yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori sirkulasi elite Vilfredo Pareto.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Metode ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendalam tentang mengapa dan bagaimana dalam fenomena penelitian (Yin Robert K, 2006). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ponorogo, dipilih karena memiliki fenomena politik yang menarik, di mana sejarah menunjukkan belum ada pemimpin daerah atau petahana yang mampu mempertahankan kekuasaannya sejak Pilkada 2005 sampai dengan 2020. Hal ini mencerminkan proses sirkulasi elite di Ponorogo yang terus mengalami pergantian di setiap Pilkada. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun proses *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan subjek penelitian yang didasarkan pada karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti (Kumara, 2018). Sementara *snowball sampling* diperoleh secara bergulir melalui rekomendasi responden sebelumnya (Nurdiani, 2014). Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 13 orang, terdiri dari 2 ketua tim

pemenangan, 1 perwakilan fraksi, 1 perwakilan Bawaslu Ponorogo, 1 perwakilan KPUD Ponorogo, 1 ketua relawan, 1 akademisi, dan 6 masyarakat Ponorogo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur. Selain itu, teknik pengumpulan data lainnya adalah studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, buku, artikel, serta sumber lain seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik yang mendukung penelitian (Ansori, 2019). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman. Dalam model ini, data yang terkumpul akan dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Sirkulasi Elite

Pareto menjelaskan bahwa dalam lingkup masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional maupun yang sudah modern, pasti dapat ditemukan sekelompok kecil masyarakat atau minoritas yang memerintah masyarakat lain. Sekelompok kecil masyarakat tadi dapat dikatakan sebagai lapisan elite yang memerintah atau *“governing elite”* sedangkan elite yang tidak sedang memerintah disebut sebagai *“non-governing elite”*. Lapisan elite yang sedang memerintah ini terdiri dari masyarakat yang menduduki jabatan-jabatan politis sedangkan elite yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan politis, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan (Haryanto, 2017). Pada konteks kontestasi di Pilkada Kabupaten Ponorogo terdapat proses sirkulasi elite atau pergantian elite yang mempertemukan kandidat dari golongan *“governing elite”* dalam hal ini kandidat petahana Ipong Muchlissoni melawan golongan *“non-governing elite”* yaitu Sugiri Sancoko.

Ipong Muchlissoni dikatakan sebagai kelompok *“governing elite”* karena Ipong merupakan kandidat petahana yang menjabat sebagai seorang bupati dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai elite yang mempunyai kuasa di lingkup pemerintahan. Sedangkan kompetitornya Sugiri Sancoko dikelompokkan sebagai golongan *“non-governing elite”* karena Sugiri sebelumnya merupakan seorang tokoh yang tergolong dari kelompok elite dan ketika mengikuti kontestasi Pilkada sedang tidak menduduki jabatan di pemerintahan, namun mempunyai kuasa di lingkup masyarakat. Dalam memilih pemimpin politik tentu ada yang menang dan ada pula yang kalah. Karena itu, Pilkada merupakan bagian dari suksesi kepemimpinan politik (Haboddin & Rozuli, 2023).

Berangkat dari partai Nasdem awalnya Ipong sebagai kandidat petahana sudah ada indikasi untuk maju sebagai calon tunggal, dengan syarat Ipong mau menerima wakil yang diusulkan oleh PDIP. Namun dikarenakan Nasdem menolak atau kurang setuju dengan tawaran calon wakil yang diberikan oleh PDIP maka calon tunggal di Pilkada Ponorogo tahun 2020 batal untuk dilaksanakan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari tim kemenangan Ipong sebagai berikut:

“Sebetulnya di tahun 2020 kemarin Pak Ipong ini hampir saja jadi calon tunggal. Ketika waktu itu PDIP mengajukan calon wakil dan diterima maka akan terjadi calon tunggal artinya tidak ada lawan di Pilkada Ponorogo. Cuma menurut cerita dari Pak Ipong waktu itu kalau dengan PDIP maka Nasdem tidak berkenan. Akhirnya karena Pak Ipong ini dipandang mempunyai power yang kuat dari segi figur, jumlah partainya juga besar maka wakilnya siapapun pada waktu itu bisa diperkirakan tetap akan menang.”¹

Setelah melalui proses dan pertimbangan mengenai pemilihan wakil yang cukup ulet, akhirnya Ipong dan seluruh partai pendukung menyetujui Bambang Tri Wahono sebagai

¹ Hasil wawancara peneliti

calon wakil yang akan mendampingi Ipong. Batalnya calon tunggal tersebut pada akhirnya memunculkan kompetitor baru dari partai PDIP yaitu Sugiri Sancoko berpasangan dengan Lisdyarita. Maka dengan terciptanya dua kandidat di Pilkada Ponorogo tersebut memunculkan dua gerbong yang saling berkompetisi antara kubu petahana melawan kandidat baru. Kubu petahana diusung oleh 6 partai pengusung dengan jumlah 36 kursi, dimana deklarasi Ipong bersama 6 partai pengusung dilakukan di Masjid Jami Kota Lama Pasar Pon.

Disisi lain kompetitor Ipong yaitu Sugiri Sancoko yang hanya diusung oleh 4 partai pengusung dengan total jumlah 9 kursi di parlemen, menggelar deklarasi di Lapangan Bantarangin Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Pada deklarasi tersebut Sugiri melalui sambuatnya menyampaikan dirinya berasal dari “wong cilik” akan bekerja keras untuk membuktikan keinginan rakyat kecil yang membutuhkan perubahan menuju Ponorogo yang lebih baik. Sugiri menyadari bahwa kompetitornya adalah tokoh besar yang mempunyai partai pengusung besar dan finansial yang mendukung. Hal ini kemudian disampaikan oleh ketua tim pemenangan Sugiri Sancoko bahwa pertarungan Pilkada ini jika di ibaratkan adalah pertarungan semut melawan gajah.

Diibaratkan sebagai gajah karena selain dari strategi koalisi yang diusung Ipong merupakan koalisi besar, dari segi kekayaan Ipong ini dinilai mempunyai finansial yang cukup mumpuni dibandingkan dengan kompetitornya. Latar belakang Ipong yang sebelumnya merupakan seorang pengusaha sukses di Kalimantan cukup memberikan pengaruh besar dalam pencalonannya di Pilkada. Hal tersebut dapat dilihat melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilampirkan setiap calon ketika mendaftar di tanggal 4-6 September 2020 lalu berikut rincian dari setiap pasangan calon:

Tabel 1. Laporan Harta Kekayaan Setiap Kandidat

NO	Nama Calon	Jumlah Kekayaan
1.	Ipong Muchlissoni	Rp 38.019.284.028.
2.	Bambang Tri Wahono	Rp 2.928.000.000
3.	Sugiri Sancoko	Rp 5.037.549.500
4.	Lisdyarita	Rp 13.037.971.545.

Sumber: (Marhaban, 2020)

Melalui data diatas dijelaskan Ipong merupakan kandidat yang mempunyai kekayaan paling banyak dengan total 38 Miliar, Bambang sebagai pendamping Ipong mempunyai jumlah kekayaan sekitar 2 Miliar lebih. Sementara itu kubu kompetitor dari segi kekayaan Lisdyarita sebagai wakil yang mendampingi Sugiri mempunyai harta kekayaan jauh diatas Sugiri yaitu sekitar 13 Miliar sedangkan Sugiri tercatat mempunyai harta kekayaan sekitar 5 Miliar lebih. Lisdyarita sendiri selain sebagai seorang politisi di kader PDIP dulunya merupakan pengusaha yang cukup sukses di wilayah Ponorogo.

Kemudian jika dilihat melalui hasil survei, *The Republic Institute* telah melakukan dua kali survei menjelang Pilkada, dan hasil kedua survei tersebut menunjukkan tren yang berbeda. Antara survei pertama dan kedua, terjadi pergeseran suara. Pada survei kedua, elektabilitas pasangan calon petahana Ipong-Bambang mengalami penurunan, sedangkan pasangan Sugiri-Lisdyarita mengalami kenaikan. Pada survei pertama, pasangan Sugiri-Lisdyarita mendapatkan 49,5%, kemudian naik 3,2% menjadi 52,7% pada survei kedua. Sementara itu, pasangan Ipong-Bambang yang awalnya mendapatkan 44% suara, turun 1,5% menjadi 42,5% pada survei kedua. Dari hasil survei tersebut, jug menunjukkab bahwa pasangan calon petahana tertinggal cukup jauh, mencapai 10%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa indikator atau variabel yang mempengaruhi penurunan dukungan kepada calon petahana. Menurut analisis dari *The Republic Institute*, faktor utama peralihan suara masyarakat adalah kinerja Ipong selama menjabat sebagai kepala daerah yang dinilai kurang maksimal, dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ipong hanya sekitar 60%.

Melihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ipong Muchlissoni selaku kandidat petahana, nyatanya hal tersebut tidak mampu memberikan hasil kemenangan untuk

mempertahankan jabatannya. Ketidakmampuan petahana dalam menggerakkan modal politik berupa mesin koalisi besar, kemudian didukung posisinya sebagai petahana serta model ekonomi dari segi kemampuan finansial yang mumpuni, dapat dijelaskan melalui hasil perolehan suara yang terpaut jauh yakni petahana 38,3 persen sedangkan kompetitornya unggul 61,7 persen. Dari total 21 Kecamatan, petahana hanya berhasil menang di 1 Kecamatan sedangkan pasangan Sugiri berhasil menang telak di 20 Kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Kekalahan petahana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memberikan pelajaran berharga bahwa Pilkada berfungsi sebagai pendidikan politik bagi kita semua melalui proses sirkulasi elite di tingkat lokal. Pemahaman politik bahwa Pilkada sebagai proses perebutan dan mempertahankan kekuasaan terlihat jelas, dimana petahana berusaha mempertahankan jabatannya sementara penantang berusaha merebutnya di arena Pilkada. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Ipong Muchlissoni, sebagai petahana harus merelakan kursinya dan mengakui bahwa kekuasaan yang dipegangnya selama lima tahun tidak dapat dipertahankan.

Penyebab Kekalahan Petahana

Penyebab kekalahan petahana Ipong muchlissoni dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Berikut dijelaskan mengenai faktor kekalahan petahana Ipong Muchlissoni pada Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020:

1. Bangunan Koalisi Tidak Solid

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ponorogo tahun 2020, petahana berupaya membangun koalisi besar sebagai strategi utama untuk memperkuat posisinya dan menjamin keberhasilan dalam kontestasi politik tersebut. Koalisi besar ini terdiri dari berbagai partai politik dengan beragam latar belakang dan kepentingan. Meskipun tampak solid di permukaan, seiring berjalannya waktu, koalisi ini menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kesolidannya.

Ipong Muchlissoni sebagai petahana diusung oleh koalisi besar berjumlah 6 partai pengusung dengan jumlah total 36 kursi. Adapun rincian partainya Nasdem menyumbang kursi terbanyak dengan jumlah 10 kursi, PKB mendapat 8 kursi, Gerindra mendapatkan 5 kursi, Demokrat mendapatkan 5 kursi, Golkar mendapatkan 4 kursi dan PKS mendapatkan 4 kursi. Bila dilihat melalui komposisi partai pengusung menunjukkan kebesaran kekuasaan seorang petahana sehingga dapat membangun koalisi dari lintas ideologi antara basis nasionalis dan islam. Basis partai nasionalis seperti Nasdem, Gerindra, Demokrat dan Golkar. Sementara yang lain ada partai berbasis islam yang diwakili oleh PKB dan juga PKS. Harapan Ipong diawal yang menyatakan bahwa dengan dibangunnya koalisi besar ini maka kemungkinan kemenangan minimal 80 persen ternyata gagal di wujudkan.

Dikarenakan masalah yang cukup rumit justru timbul dari partai pengusung yang pada praktiknya tidak berjalan selama proses pencalonan. Kenyataannya partai pengusung yang sudah dibentuk oleh Ipong hanya memberikan tiket saja tetapi tidak ikut melakukan kontribusi dalam upaya memenangkan pasangan Ipong Muchlissoni. Ketidakharmonisan dan adanya kepentingan tersembunyi di antara partai-partai koalisi dapat berujung pada kegagalan strategi yang telah dirancang, sebagaimana yang dialami oleh kandidat petahana Ipong Muchlissoni. Maka pada kasus ini bisa disimpulkan bahwa koalisi besar tidak menjadi jaminan sebuah kemenangan bagi petahana. Justru Sugiri, sebagai penantang yang hanya diusung oleh empat partai koalisi dengan total sembilan kursi, berhasil menggeser posisi petahana yang diusung oleh koalisi besar. Kesuksesan Sugiri menunjukkan bahwa kekuatan koalisi tidak hanya diukur dari jumlah partai atau kursi yang mendukung, tetapi juga dari kekompakan, strategi yang efektif, dan kemampuan menarik simpati pemilih. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa kualitas dan sinergi dalam koalisi lebih penting daripada kuantitas semata.

2. Kontroversi Petahana dalam Pandangan Masyarakat

Ponorogo dikenal luas dengan kekayaan budayanya yang unik serta kehidupan religius yang kental. Kota ini sering disebut sebagai "Kota Santri" karena banyaknya pesantren yang tersebar di berbagai sudut wilayahnya. Ponorogo juga terkenal sebagai pusat seni Reog, sebuah tarian tradisional yang mendunia dan menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Sebagai kota dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, Ponorogo telah menjadi tempat bersemayamnya berbagai tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya dan kehidupan santri yang kental di Ponorogo tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya, tetapi juga berdampak signifikan pada perilaku memilih masyarakat dalam konteks Pilkada. Sehingga apabila ada kandidat atau pemimpin yang mempunyai etika bertentangan dengan masyarakat, maka akan langsung mendapatkan respon yang buruk dari masyarakat sekitar. Pada konteks Pilkada tahun 2020 beredarnya berbagai isu yang di alami oleh petahana Ipong beserta calon wakilnya yaitu Bambang Tri Wahono ternyata menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan kekalahan dari pasangan tersebut. Isu yang berkembang di masyarakat mengenai kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Ipong sangat bertentangan dengan kultur masyarakat Kabupaten Ponorogo yang memang masih kuat dengan budaya dan religiusnya.

Beredarnya isu perselingkuhan yang menyangkut petahana Ipong beserta calon wakilnya pada akhirnya menjadi faktor yang memicu kekalahan mereka di Pilkada Ponorogo tahun 2020. Masyarakat Ponorogo yang identik dengan kebudayaan dan religiusitas tentu merasa isu tersebut sangat bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak lawan sebagai strategi untuk mengalahkan petahana Ipong. Dengan cara memanfaatkan sentimen masyarakat terhadap isu moral dan integritas maka akan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Ipong dan Bambang yang berujung pada kekalahan mereka dalam pemilihan tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan perwakilan fraksi Nasdem Ponorogo sebagai berikut:

“Ada faktor black campaign yang menyentuh kepada kalangan perempuan khususnya berkaitan dengan calon wakilnya dan hal itu mempunyai dampak yang luar biasa. Adanya permasalahan ini kemudian akan susah untuk di cover oleh konsultan maupun tim dari Pak Ipong karena memang informasi yang keluar susah dibendung. Kasus ini lumayan cukup rumit karena sampai dibawa ke ranah hukum dan benar terjadi. Bahkan banyak video video yang beredar tentang hal tersebut. Nah ini pengaruhnya terhadap keluarga dan lingkungan itu luar biasa.”²

Ditambah, gaya kepemimpinan Ipong yang kurang bisa merakyat menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk tidak memilihnya kembali sebagai pemimpin Ponorogo di periode selanjutnya. Masyarakat merasa bahwa Ipong kurang mampu mendengarkan dan memahami aspirasi mereka dan cenderung punya sifat elitis. Kondisi ini menciptakan jarak antara pemimpin dan masyarakat, yang seharusnya memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari masyarakat Sukosari Ponorogo, sebagai berikut:

“Terkait kepemimpinan memang tipikal masyarakat sini itu tidak mau pemimpin itu yang miyayeni. Jadi mau cari yang seperti orang biasa yang merakyat. Pak Ipong menurut saya dan mayoritas warga di sini itu jauh dari kata merakyat. Namun kalau dari segi pembangunan saya akui cukup bagus dan merata.”³

Akumulasi dari berbagai isu negatif ini akhirnya membuat masyarakat Ponorogo memutuskan untuk mencari pemimpin baru yang lebih sesuai dengan harapan mereka, yang lebih merakyat, dan mampu membawa perubahan positif bagi daerah Ponorogo. Keputusan

² Hasil wawancara peneliti

³ Hasil wawancara peneliti

ini juga mencerminkan dinamika sirkulasi elite di Ponorogo, di mana masyarakat mulai mempertanyakan dominasi elite lama yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka

3. Kepemimpinan Petahana Dinilai Buruk

Masa kepemimpinan Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, dinilai masyarakat secara luas gagal dan meninggalkan catatan negatif di hati mereka. Kinerja Bupati Ipong selama masa jabatannya dianggap buruk, dengan banyaknya desas-desus mengenai kasus korupsi, masalah infrastruktur, serta kurangnya perhatian dan pengayoman terhadap masyarakat. Akhirnya, keresahan tersebut memicu masyarakat untuk secara sepakat mengganti pemimpin Ponorogo pada saat Pilkada 2020.

Kekecewaan yang dialami masyarakat selama masa kepemimpinan Ipong dapat dilihat melalui aksi yang kerap kali terjadi. Salah satunya terkait aksi yang menuntut bupati Ipong mundur dari jabatannya dikarenakan beberapa persoalan. Persoalan tersebut misalnya mengenai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, lemahnya penanganan terhadap masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Demonstrasi dan protes dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja pemerintahan Ipong, sehingga memperburuk citranya di mata publik dan berkontribusi pada kekalahannya di Pilkada Ponorogo tahun 2020.



Gambar 1. Aksi Masyarakat Ponorogo

Sumber: (Wicaksono, 2018)

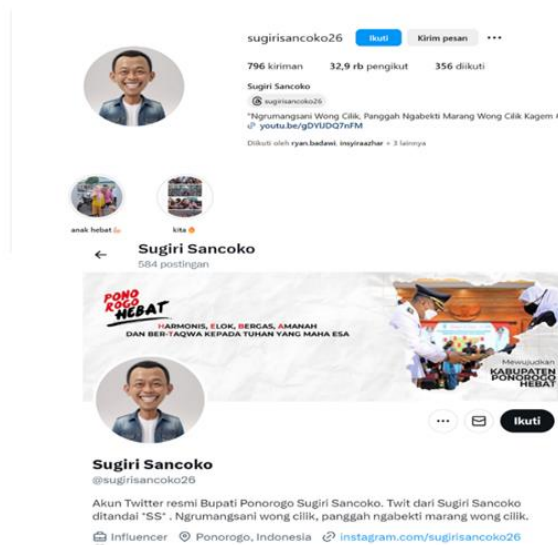
Aksi diatas menuntut agar Ipong mundur dari jabatannya sebagai Bupati Ponorogo karena kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya dianggap menindas rakyat kecil. Berbagai elemen masyarakat yang bersatu dalam aksi protes ini mencakup kelompok pengemudi Bentor, pekerja tambang di Sampung, warga yang terdampak oleh pembangunan Waduk Bendo, kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL), serta para pedagang di Pasar Songgolangit Ponorogo. Mereka mengekspresikan kekecewaan mereka melalui orasi yang dilakukan secara bergantian. Selain itu, massa juga menggelar aksi teatrikal dengan membakar patung replika Bupati dan gerobak sebagai simbol kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah (Budiarso & Harsono, 2021).

Akumulasi dari berbagai permasalahan membuat masyarakat menilai bahwa masa kepemimpinan Ipong dinilai cukup buruk. Kekecewaan yang dimiliki oleh masyarakat ditambah lagi sikap dan etika Ipong yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat semakin memperkuat ketidakpuasan publik. Rentetan penyebab tersebut menjadi faktor yang mendorong kekalahan Ipong Muchlissoni dalam Pilkada Ponorogo tahun 2020. Sehingga pada akhirnya terjadi proses sirkulasi elite di Kabupaten Ponorogo yang menandai berakhirnya masa kepemimpinan Ipong dan dimulainya era baru dalam pemerintahan daerah.

4.Strategi yang Tepat Diracik Oleh Kompetitor

Mengalahkan petahana bukanlah perkara yang mudah, mengingat petahana memiliki segalanya mulai dari infrastruktur hingga suprastruktur politik. Keuntungan lainnya yaitu petahana sudah bisa mengampunyeckan dirinya selama lima tahun dan hal tersebut merupakan bonus yang tidak di dapatkan oleh penantang. Strategi yang coba di bangun oleh pasangan Sugiri ini adalah dengan menampilkan dirinya merupakan sosok calon pemimpin yang populis. Hal tersebut dapat dilihat melalui visi misi, program kerja maupun cara kampanye yang dilakukan oleh Sugiri.

Sugiri Sancoko menerapkan strategi pemenangan dengan menawarkan perubahan untuk masyarakat Ponorogo dengan tagline “Rilis Perubahan Ponorogo”. Sugiri dan pasangannya *membranding* dirinya sebagai calon bupati yang merakyat dan merangkul masyarakat kecil. Bahkan melalui akun resmi di beberapa media sosial pribadinya, Sugiri menampilkan tagline "Ngrumangsani Wong Cilik, Panggah Ngabekti Marang Wong Cilik Kagem #PonorogoHebat" yang artinya merasa berasal dari wong cilik, tetap tetap berbakti kepada mereka untuk mewujudkan Ponorogo Hebat. ditampilkan melalui data berikut:



Gambar 2. Akun Resmi Sosial Media Sugiri
Sumber: Instagram dan Twitter resmi Sugiri Sancoko

Sugiri Sancoko menerapkan strategi kampanye yang berfokus pada pendekatan langsung dengan masyarakat, terutama kalangan bawah. Melalui berbagai kegiatan yang mendekatkan dirinya dengan komunitas-komunitas lokal, Sugiri berhasil membangun hubungan yang erat dengan masyarakat Ponorogo. Sugiri berupaya untuk turun ke beberapa kelompok masyarakat. Seperti turun langsung ke *home industry* batik, kelompok difabel, paguyuban warkop, beberapa pasar yang ada di Ponorogo, komunitas seniman Ponorogo, komunitas pedagang kaki lima, komunitas reyog obyok, paguyuban *dump truck* Ponorogo, para peternak, petani serta mengunjungi pasar pasar yang ada di Ponorogo menjadi sasaran pasangan Sugiri untuk melakukan kampanye langsung dengan masyarakat. Pendekatan dengan beberapa komunitas tersebut memberikan poin tambahan untuk Sugiri dikalangan masyarakat. Mungkin secara modal Sugiri bisa dikatakan tidak terlalu besar tetapi disektor masyarakat kecil dan beberapa komunitas Sugiri unggul. Karena Ipong pada saat itu tidak sampai turun ke komunitas atau masyarakat di kalangan bawah.

Selain memperlihatkan sosok pemimpin yang populis di kalangan masyarakat. Sugiri juga berhasil melakukan konsolidasi ke berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah, yang pada awalnya hanya fokus pada urusan keagamaan, kini telah memperluas cakupannya ke ranah sosial-politik di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ulama-ulama dari kedua organisasi ini menjadi salah satu lumbung suara yang signifikan dalam pelaksanaan Pilkada. Kondisi dukungan kedua

organisasi besar tersebut nampak berbeda di Pilkada tahun 2015, yang mana 2015 NU dan Muhammadiyah mendukung Ipong sebagai calon Bupati, namun di tahun 2020 kedua organisasi besar ini berbalik untuk mendukung Sugiri Sancoko.

Dampak Sirkulasi Elite

Salah satu dampak dalam sirkulasi elite di Pilkada Ponorogo adalah bagaimana elite politik yang lama dalam hal ini Ipong Muchlissoni menghadapi tantangan dari elite politik baru, yaitu Sugiri Sancoko. Pergeseran ini tidak hanya melibatkan kekuatan politik di tingkat elite, tetapi juga dinamika di lapangan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sugiri, sebagai penantang, berhasil menarik dukungan yang cukup signifikan dari masyarakat, meskipun secara matematis memiliki kekuatan koalisi partai yang lebih kecil dibandingkan dengan Ipong. Ini menegaskan bahwa dalam proses sirkulasi elite, faktor non-formal seperti ketokohan, kemampuan menjangkau aspirasi publik, dan strategi pemenangan memainkan peran penting.

Selain itu, dampak lain dalam sirkulasi elite di Ponorogo adalah bagaimana koalisi partai politik mengelola perubahan kekuasaan ini. Partai-partai yang sebelumnya mendukung Ipong Muchlissoni harus mampu beradaptasi dengan perubahan politik dan mencari posisi baru dalam struktur kekuasaan lokal. Dalam konteks ini, koalisi partai pendukung Sugiri juga menghadapi tantangan untuk memanfaatkan momentum kemenangan mereka untuk membangun stabilitas politik yang baru di Ponorogo.

Dampak lainnya berkaitan dengan kapasitas elite baru dalam memenuhi ekspektasi masyarakat setelah memenangkan Pilkada. Pergantian elite, jika tidak disertai dengan perubahan yang nyata dan positif dalam kebijakan serta kinerja pemerintahan, dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi elite politik baru untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan elite sebelumnya. Sugiri Sancoko, sebagai pemimpin baru, harus mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Ponorogo agar sirkulasi elite ini benar-benar bermakna bagi kemajuan daerah.

Refleksi Kritis

Refleksi kritis terhadap dinamika politik dalam Pilkada Ponorogo selama 15 tahun terakhir menunjukkan adanya stagnasi politik. Terbukti persaingan elite antara Ipong Muchlissoni dan Sugiri Sancoko terus terjadi sejak Pilkada tahun 2015, 2020 sampai Pilkada 2024 mendatang. Fenomena ini menyebabkan kompetisi politik di daerah tersebut hanya melibatkan figur-figur lama yang sudah dikenal publik, tanpa adanya pembaruan yang signifikan dalam peta persaingan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin daerah mereka, karena calon-calon yang tampil masih berasal dari lingkaran elite yang sama.

Stagnasi politik ini juga menandai kegagalan proses regenerasi elite yang seharusnya terjadi secara alami dalam sistem demokrasi. Regenerasi ini penting untuk memberikan ruang bagi tokoh-tokoh baru yang memiliki visi dan inovasi segar dalam memimpin. Sirkulasi elite yang sehat memerlukan pergantian kepemimpinan secara berkala, dimana tokoh-tokoh yang potensial diberi kesempatan untuk tampil dan memimpin. Tanpa adanya regenerasi yang efektif, masyarakat akan terus menghadapi situasi politik yang monoton, dengan pilihan yang terbatas, dan minim perubahan yang berarti.

Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2020, memperlihatkan pola kontestasi yang terjadi antar sesama elite itu sendiri. Perebutan kekuasaan terjadi antara elite yang sedang menjabat dan elite yang tidak sedang menjabat, tanpa adanya masuknya aktor-aktor baru yang mampu menggoyang dominasi kekuatan elite yang sudah mapan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam menciptakan sirkulasi elite yang lebih inklusif dan mendorong regenerasi politik agar demokrasi lokal dapat berkembang dengan lebih baik.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolektif dari berbagai pihak untuk mendorong proses regenerasi politik yang lebih dinamis di Ponorogo. Partisipasi aktif masyarakat dan komitmen partai politik dalam mendukung calon-calon baru yang berintegritas dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki stagnasi politik yang telah terjadi selama ini.

KESIMPULAN

Kekalahan petahana dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo 2020 memberikan pembelajaran penting mengenai proses sirkulasi elite dalam politik lokal, yang merupakan arena untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, Ipong Muchlissoni, sebagai petahana, harus merelakan posisinya kepada penantangannya, Sugiri Sancoko. Proses ini mencerminkan dinamika antara kelompok governing elite, yang diwakili oleh Ipong, dan *non-governing elite*, yang diwakili oleh Sugiri. Kegagalan Ipong dalam mempertahankan kekuasaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti koalisi besar yang tidak solid, kontroversi petahana dalam pandangan masyarakat, kinerja petahana yang dinilai buruk, serta strategi pemenangan Sugiri yang lebih efektif dan sesuai dengan kultur masyarakat Ponorogo.

Selain itu sirkulasi elite di Ponorogo juga membawa dampak signifikan pada pengelolaan kekuasaan, terutama dalam hal adaptasi koalisi partai politik terhadap perubahan struktur kekuasaan lokal. Partai-partai yang sebelumnya mendukung Ipong Muchlissoni harus menyesuaikan diri, sementara koalisi pendukung Sugiri Sancoko menghadapi tantangan untuk mempertahankan stabilitas politik pasca kemenangan mereka. Selain itu, elite baru harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dengan kebijakan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini menemukan implikasi akademis bahwa sirkulasi elite tidak hanya didorong oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat. Penelitian ini memperkuat teori sirkulasi elite Pareto, dengan menambahkan pemahaman bahwa dalam konteks tertentu, modal sosial dapat lebih berpengaruh daripada modal ekonomi dalam proses pergantian elite. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa sirkulasi elite dapat berjalan secara efektif melalui Pilkada jika elite baru mampu memanfaatkan dinamika sosial yang ada.terjadi.

REFERENSI

- Ansori, Y. Z. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110.
- Ardiyanto, S. (2023). *KEMENANGAN SUKANDAR - SYAHLAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEBO TAHUN 2017-2022*. IlmuPolitik.
- Bottomore, T. B. (2006). *Elite dan Masyarakat*. Akbar Tandjung Institiute.
- Budiarso, A., & Harsono, J. (2021). *Analisis Terciptanya Transisi Kepemimpinan Baru Dalam Perhelatan Pilkada Ponorogo Dilihat Dari Perspektif Masyarakat*. 6(1).
- Haboddin, M. (2020). Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4>
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2023). *Pilkada Serentak Jawa Timur*. Universitas Brawijaya Press.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar*. PolGov. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/f/810/elit-massa-dan-kekuasaan-haryanto>
- Indah, M. (2023). *ANALISIS KEMENANGAN ROMI HARYANTO DAN ROBI NAHLIANSYAH DALAM PEMILUKADA SERENTAK DI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020*. UniversitasJambi.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Marhaban, M. (2020, October 3). *Pilbup Ponorogo, Ipong Muchlissoni Calon Paling Kaya*. <https://Timesindonesia.Co.Id/Politik/300695/Pilbup-Ponorogo-Ipong-Muchlissoni-Calon-Paling-Kaya>.

- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Wicaksono, Y. (2018, April 11). *Aliansi Masyarakat Ponorogo Tuntut Mundur Bupati Ipong*. <https://www.superradio.id/Aliansi-Masyarakat-Ponorogo-Tuntut-Mundur-Bupati-Ipong/>.
- Yin Robert K. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT Raja Grafindo Persada.